



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/214 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban bagi pemegang izin usaha khususnya perkebunan kelapa sawit yang mencakup penerapan tata kelola penguasaan dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi dalam melakukan evaluasi terhadap Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Jayapura Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Jayapura kepada Kepala Badan Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Menandatangani Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 47)
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat berita Acara Pemeriksaan;
 - b. memberikan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. melakukan evaluasi setelah penerbitan izin dan Non izin;
 - d. membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Jayapura melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak Bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/214 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM EVALUASI IZIN USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pembina
2.	Wakil Bupati Jayapura	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Jayapura	Ketua
4.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Papua	Anggota
9.	Kepala ATR/BPN Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Papua	Anggota
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengkajian Pembinaan Teknis AMDAL dan Hukum Perizinan	Anggota
19.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundangan-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum dan Perundangan-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Sekretaris Eksekutif Jaringan Kerja Rakyat Papua	Anggota
27.	Direktur Eksekutif Yali Papua	Anggota
28.	Direktur Yayasan Auriga Nusantara	Anggota
29.	Direktur Yayasan Pusaka	Anggota
30.	Direktur PT. PPMA Papua	Anggota
31.	Ketua Organisasi Perempuan Namblong	Anggota
32.	Kepala Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
33.	Ketua Harian Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Jayapura	Anggota
35.	Direktur LBH Papua	Anggota
36.	Direktur Paham Papua	Anggota
37.	Admin Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003